

PROGRAM PRIORITAS PERPEKINDO

PERHIMPUNAN PETANI KELAPA INDONESIA

PERIODE 2026-2031

“Mewujudkan Petani Kelapa Indonesia yang Sejahtera, Berdaulat, Modern, dan Berdaya Saing melalui Penguatan Kelembagaan, Stabilitas Harga, serta Hilirisasi Industri Kelapa Nasional.”

Dewan Pimpinan Nasional (DPN)

PENDAHULUAN

Program Prioritas PERPEKINDO periode 2026–2031 disusun sebagai arah perjuangan organisasi untuk memperkuat posisi petani kelapa dari tingkat desa hingga nasional, meningkatkan pendapatan petani, serta menjadikan kelapa sebagai komoditas strategis ekonomi rakyat Indonesia.

Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan kebutuhan petani di daerah. DPN, DPW, DPD, serta Koordinator Wilayah/Pulau menjalankan program sesuai kewenangan, kapasitas organisasi, dan kondisi sentra produksi masing-masing.

I. SEPULUH PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Perjuangan Harga Kelapa yang Adil dan Stabil

- Memperjuangkan kebijakan harga dasar atau harga acuan kelapa di tingkat petani.
- Mengusulkan harga minimal indikatif Rp5.000 per butir dengan mempertimbangkan kualitas, biaya produksi, kondisi pasar, dan kebijakan pemerintah.
- Mendorong transparansi harga, penertiban praktik perdagangan yang merugikan petani, serta pengawasan rantai niaga.
- Membangun sistem informasi harga kelapa nasional.

2. Peremajaan dan Rehabilitasi Perkebunan Kelapa Rakyat

- Memperjuangkan peremajaan tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak produktif.
- Mendorong penyediaan bibit unggul, pupuk, alat pertanian, dan pendampingan teknis.
- Mengembangkan kebun kelapa terpadu dengan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
- Memperjuangkan kepastian legalitas lahan petani, termasuk penyelesaian persoalan kebun kelapa yang berada di kawasan hutan sesuai ketentuan hukum.

3. Hilirisasi dan Industrialisasi Kelapa Nasional

- Mendorong pembangunan industri pengolahan kelapa di sentra produksi.
- Mengembangkan produk bernilai tambah: minyak kelapa mentah (CNO), VCO, santan, air kelapa, gula kelapa, arang tempurung, karbon aktif, dan serat sabut.
- Memperkuat kemitraan petani dengan industri pengolahan dan eksportir.
- Memperjuangkan akses pembiayaan untuk koperasi dan industri kecil pengolahan kelapa.

4. Penguatan Kelembagaan dan Konsolidasi Petani

- Membentuk dan memperkuat DPN, DPW provinsi, serta DPD kabupaten/kota.
- Membangun basis data petani, luas kebun, produksi, dan potensi komoditas kelapa.
- Membentuk kelompok tani, koperasi produsen, dan unit usaha bersama.
- Meningkatkan kapasitas pengurus melalui pendidikan organisasi, pelatihan, dan kaderisasi.

5. Reformasi Tata Niaga dan Akses Pasar

- Mendorong perdagangan yang transparan dan persaingan usaha yang sehat.
- Mengembangkan pusat pengumpulan, pergudangan, dan pemasaran bersama.
- Memperluas akses pasar domestik dan ekspor bagi petani serta koperasi.
- Mengadvokasi dugaan praktik kartel atau penguasaan pasar melalui mekanisme hukum dan lembaga berwenang apabila ditemukan bukti.

6. Pembiayaan dan Kemandirian Ekonomi Petani

- Memperluas akses KUR dan pembiayaan perbankan bagi petani serta koperasi.
- Mendorong kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta, dan lembaga pembiayaan.
- Mengembangkan dana bergulir, usaha kolektif, dan kemitraan yang adil.
- Memperjuangkan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk pengembangan perkebunan kelapa rakyat.

7. Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Pendapatan

- Mengembangkan usaha air kelapa segar, kelapa muda, makanan berbahan kelapa, dan produk turunan lainnya.
- Mendorong pemanfaatan seluruh bagian buah kelapa agar mendekati konsep tanpa limbah (zero waste).
- Mengembangkan agrowisata kelapa dan kebun kelapa terpadu.
- Mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam kewirausahaan berbasis kelapa.

8. Perlindungan Lingkungan dan Adaptasi Iklim

- Mendorong perkebunan kelapa yang ramah lingkungan.
- Mengembangkan tumpang sari yang sesuai dengan kondisi lahan.
- Memperkuat konservasi tanah, air, daerah aliran sungai, dan kawasan pesisir.
- Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kekeringan, banjir, kebakaran, dan perubahan iklim.

9. Riset, Teknologi, dan Peningkatan Kualitas

- Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan balai pertanian.
- Mengembangkan standar mutu kelapa untuk pasar industri dan ekspor.
- Mendorong mekanisasi panen, pascapanen, dan pengolahan.
- Mengembangkan pusat data serta informasi produksi, harga, dan permintaan pasar.

10. Advokasi Kebijakan dan Kemitraan Strategis Nasional

- Memperjuangkan kebijakan perkebunan kelapa yang berpihak kepada petani.
- Membangun komunikasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, DPR/DPD, perbankan, dan pelaku industri.
- Mendorong peta jalan pengembangan dan hilirisasi kelapa nasional.
- Memperjuangkan perlindungan petani, kepastian usaha, serta akses terhadap program pemerintah.

II. TARGET PELAKSANAAN PROGRAM 2026-2031

Tahapan	Fokus Utama
2026-2027	Konsolidasi organisasi, pendataan petani, advokasi harga, dan penyusunan peta potensi kelapa nasional.
2027-2028	Penguatan koperasi, kemitraan industri, akses pembiayaan, serta peremajaan kebun rakyat.
2028-2029	Pengembangan pusat pengumpulan hasil, unit pengolahan, dan pemasaran bersama.
2029-2030	Perluasan hilirisasi, akses ekspor, penguatan usaha petani, dan pengembangan produk turunan.
2030-2031	Evaluasi capaian, penguatan kemandirian organisasi, serta penyusunan agenda perjuangan periode berikutnya.

Catatan: Tahapan tersebut merupakan rancangan program organisasi, bukan jadwal resmi pemerintah. Penetapan target tahunan perlu menyesuaikan hasil pendataan dan kemampuan organisasi.

III. PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI

- DPN PERPEKINDO: Menetapkan kebijakan nasional, mengoordinasikan advokasi, dan membangun kemitraan strategis.
- DPW PERPEKINDO: Mengonsolidasikan organisasi di tingkat provinsi serta mengoordinasikan program lintas kabupaten/kota.
- DPD PERPEKINDO: Mengorganisasi petani di tingkat kabupaten/kota, mendata produksi, dan membangun kelompok usaha.
- Koordinator Wilayah/Pulau: Memfasilitasi koordinasi lintas provinsi sesuai pembagian wilayah organisasi yang ditetapkan dalam AD/ART.

IV. INDIKATOR KEBERHASILAN

- Jumlah DPW dan DPD aktif serta memiliki program kerja.
- Jumlah petani dan luas perkebunan kelapa yang berhasil didata.
- Jumlah kelompok tani dan koperasi yang diperkuat.
- Jumlah kemitraan pemasaran dan pengolahan yang berjalan.
- Jumlah usulan kebijakan yang diperjuangkan dan ditindaklanjuti.
- Jumlah program peremajaan, peningkatan produktivitas, dan pengembangan produk turunan yang terealisasi.
- Perubahan pendapatan petani dan nilai tambah yang diterima petani dari hasil kelapa.

Target angka untuk setiap indikator ditetapkan setelah pendataan dasar dan pemetaan kemampuan organisasi.

V. SIKAP POLITIK PERJUANGAN PERPEKINDO

PERPEKINDO menegaskan bahwa petani kelapa tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri kelapa nasional.

- Harga yang adil: Petani memperoleh harga yang layak dan posisi tawar yang kuat.
- Kebun yang produktif: Petani mendapatkan akses terhadap bibit, sarana produksi, teknologi, dan kepastian usaha.
- Industri yang berpihak: Pengolahan dan perdagangan kelapa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan daerah penghasil.

PENEGASAN PROGRAM

DPN PERPEKINDO periode 2026–2031 menjadikan peningkatan kesejahteraan petani kelapa sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi, melalui penguatan kelembagaan, stabilitas harga, peremajaan kebun, hilirisasi, dan kemandirian ekonomi petani.